

SERI PSWP-BM



2003

STUDI KASUS

Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara



J. JOHNNES TULUNGEN
MEDIARTI KASMIDI
CHRISTOVEL ROTINSULU
MARIA DIMPUDUS
NONI TANGKILISAN

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-keelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



CRMP/Indonesia Collection

–Preface

Over the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.

When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.

The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

Pengembangan Universitas merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

University development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

National level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus**, **Buku Panduan**, **Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience

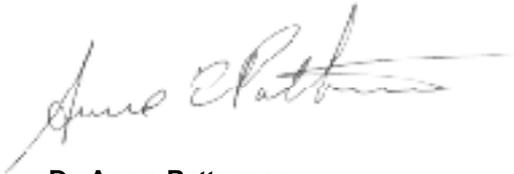
These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.



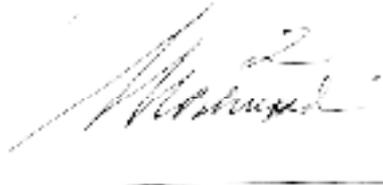
Dr. Anne Patterson
Direktur
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam
U.S. Agency for International Development/
Indonesia (USAID)



Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir
Coastal Resources Center
University of Rhode Island



Dr. Widi A. Pratikto
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



Dr. Dedi M.M. Riyadi
Deputi Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.



Dr. Anne Patterson
*Director
Office of Natural Resources Management
U.S. Agency for International
Development/ Indonesia*



Maurice Knight
*Chief of Party
Indonesia Coastal Resources
Management Project
Coastal Resources Center
University of Rhode Island*



Dr. Widi A. Pratikto
*Director General for Coasts and
Small Island Affairs
Indonesia Ministry of Marine Affairs
and Fisheries*



Dr. Dedi M.M. Riyadi
*Deputy Minister/Deputy Chairman for
Natural Resources and Environment
Indonesia National Development
Planning Agency*

August 25, 2003

DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya
Bold print indicates the language of the document

PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA

LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA

1. CD-ROM Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir
CD-ROM *Background Information and Principle Products of CRMP*
-

SERI REFORMASI HUKUM

COASTAL LEGAL REFORM SERIES

1. Studi Kasus Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Case Study Developing a National Law on Coastal Management
2. Studi Kasus Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Case Study Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Developing a District Law in Minahasa on Community-Based
Integrated Coastal Management
3. Studi Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-
Case Study Belitung
The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and
Bangka-Bilitung
4. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU
Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut
Guidebook Undang-Undang No.22/1999
Determining Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to
National Law No. 22/1999
6. Contoh Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan
Example Sumberdaya Wilayah Pesisir
The Process of Developing Coastal Resource Management Laws
7. Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan
Example Pengelolaan Wilayah Pesisir
Examples from the Development of Coastal Management Laws
8. CD-ROM Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan
CD-ROM Pengelolaan Wilayah Pesisir
Selected Documents from the Development of Coastal Management
Laws
9. CD-ROM Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
CD-ROM Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-
grated Coastal Management

SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES

1. Panduan Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
Guidebook Developing A Coastal Resources Atlas
2. Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
Example Lampung Coastal Management Program
3. Contoh Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-
Example peta Pilihan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume
of Maps
4. Contoh Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
Example Selected Compilation of Coastal Resources Atlases
5. CD-ROM Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
CD-ROM Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan
6. Katalog Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
7. Katalog Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi
Catalogue Terbatas, dengan 2 CD)
Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs)
(Limited Edition, with 2 CDs)
8. Katalog Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
9. Katalog Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)
Catalogue Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)

SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES

1. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di
Case Study Sulawesi Utara
Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
2. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Guidebook Community Based Coastal Resources Management
3. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis
Guidebook Masyarakat
Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries
4. Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri
Guidebook Crown of Thorns Clean-Ups
5. Contoh Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis
Example Masyarakat di Sulawesi Utara
Documents from Community-Based Coastal Resources Management
in North Sulawesi
6. CD-ROM Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
CD-ROM Community-Based Coastal Resources Management

**SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN
COASTAL UNIVERSITY SERIES**

1. Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
 Case Study *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
 Example *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
 Example *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
 Catalogue *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
 CD ROM *Coastal University Materials*

**SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR
COASTAL MONITORING SERIES**

1. Studi Kasus Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara
 Case Study *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan
 Guidebook *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1
 Guidebook *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow
 Guidebook *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)
 Example *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
For more information:

Coastal Resource Center
University of Rhode island
Narragansett, Rhode Island 02882, USA
Phone: 1 401 879 7224
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP
Ratu Plaza Building, lt 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9
Jakarta 10270, Indonesia
Phone: (021) 720 9596
Website: <http://www.pesisir.or.id>

Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

J. Johnnes Tulungen
Meidiarti Kasmidi
Christovel Rotinsulu
Maria Dimpudus
Noni Tangkilisan

Studi Kasus

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

J. Johnnes Tulungen
Meidiarti Kasmidi
Christovel Rotinsulu
Maria Dimpudus
Noni Tangkilisan

Kutipan: Tulungen, J.J., M. Kasmidi, C. Rotinsulu, M. Dimpudus, N. Tangkilisan, 2003. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara; Seri PSWP-BM, dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, M. Knight, S. Tighe (editor); Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 32 halaman.

Dicetak di : Jakarta, Indonesia, 2003

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM), USAID-CRC/URI Proyek Pesisir.

Keterangan lebih lengkap tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh di www.pesisir.or.id
Keterangan lebih lengkap tentang publikasi NRM bisa diperoleh di www.nrm.or.id
Keterangan lebih lengkap tentang publikasi CRC bisa diperoleh di www.crc.uri.edu

Editor Bahasa : Kun S. Hidayat, Ahmad Husein
Gambar/Peta : Proyek Pesisir Sulawesi Utara
Foto Cover : Tanyo Bangun
Tata Letak : Yayak M. Saat, Pasmus Legowo

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Pengantar | v |
| Ringkasan | vii |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 2. Tujuan dan Kerangka Kerja Konsep PSWP-BM | 3 |
| 3. Proses Program PSWP-BM | 5 |
| 3.1. Identifikasi Isu | 5 |
| 3.2. Persiapan Perencanaan | 7 |
| 3.3. Persetujuan Perencanaan dan Pendanaan | 7 |
| 3.4. Pelaksanaan dan Penyesuaian | 8 |
| 3.5. Pemantauan dan Evaluasi | 8 |
| 3.6. Isi Rencana Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara | 9 |
| 3.7. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat | 10 |
| 3.8. Peran Pendamping Masyarakat, Tim Teknis, dan Pemerintah Daerah | 10 |
| 3.9. Keberlanjutan dan Kemandirian PSWP-BM | 13 |
| 3.10. Dukungan Peraturan dalam PSWP-BM | 15 |
| 4. Pembelajaran dalam PSWP-BM di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 17 |
| 5. Kesimpulan | 20 |
| Daftar Pustaka dan Bahan Bacaan | 25 |
| Lampiran 1: Model Program PSWP-BM di Sulawesi Utara | 29 |
| Lampiran 2: Contoh Partisipasi/Peran Masyarakat dalam PSWP-BM di Sulawesi Utara | 30 |
| Lampiran 2: Kerangka kerja konsep pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu-berbasis masyarakat di Sulawesi Utara | 31 |

Pengantar

Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) ini berisi berbagai dokumen, yang menggambarkan usaha keras yang telah dilakukan Proyek Pesisir sejak tahun 1997 hingga kini dalam memperkenalkan model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.

Sebagaimana diketahui, potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada di wilayah yang terkenal paling produktif di dunia ini mempunyai makna yang sangat penting. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% (140 juta) rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Selain itu, wilayah pesisir mendukung hampir semua kegiatan perikanan Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir. Oleh karenanya, apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut.

Salah satu faktor penting yang menjadi kunci keberhasilannya adalah peran dan keterlibatan masyarakat, mengingat upaya menjaga dan mengelola tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya memiliki informasi, pemahaman, dan visi yang sama dalam mengelola sumberdaya. Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir bisa berhasil dengan baik, hanya jika *stakeholders*, utamanya masyarakat pesisir, berpartisipasi secara aktif.

Salah satu upaya melibatkan partisipasi masyarakat adalah dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Proyek Pesisir telah memperkenalkan model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Minahasa, yakni di Desa Blongko, Talise, Bentenan, dan Tumbak). Perluasan program tersebut (*scaling up*) telah pula dilakukan di desa-desa di kawasan Kecamatan Likupang Barat dan Timur. Kegiatan yang sama dilakukan di Provinsi Lampung (seperti di Pulau Sebesi). Di daerah-daerah tersebut, masyarakat mengambil tanggung jawab utama dalam pembentukan dan pengelolaan suatu wilayah laut demi melindungi keanekaragaman terumbu karang dan biota laut lainnya, yang dikenal dengan Daerah Perlindungan Laut.

Seri PSWP-BM ini terdiri atas beberapa jenis dokumen, mulai dari Studi Kasus, Contoh-contoh dokumen yang berkaitan dengan PSWP-BM, Buku-buku Panduan, dan keping Compact Disc (CD) berisikan berbagai dokumen mengenai kegiatan PSWP-BM, khususnya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dokumen-dokumen ini hendaknya dibaca secara menyeluruh, mengingat isinya terkait erat satu dengan lainnya. Adapun rincian dokumen yang dapat ditemukan dalam Seri ini adalah:

1. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.
3. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat.
4. Contoh Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
5. CD Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.

Seluruh pencapaian dan pembelajaran yang dijelaskan dalam Seri ini diharapkan dapat menjadi contoh dan model bagi program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, dan program pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah lain di Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Proyek Pesisir adalah mengembangkan model-model atau cara yang baik dalam pengelolaan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Program tersebut telah dilakukan sejak tahun 1997, khususnya di beberapa desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yaitu Desa Blongko di Kecamatan Tenga, Desa Benteenan dan Tumbak di Kecamatan Belang, Desa Talise di Kecamatan Likupang Barat, serta desa-desa perluasan program (*scaling-up*) di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur.

Studi kasus ini merangkum pendekatan dan pengalaman Proyek Pesisir dalam pengembangan program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir tingkat desa yang dilaksanakan lewat proses terpadu antara partisipasi masyarakat, keterlibatan pemerintah setempat dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang telah menghasilkan berbagai luaran positif dan nyata dilapangan. Studi kasus ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya para pengelola (*manager*) yang bekerja dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM), pendamping masyarakat atau penyuluh lapangan di desa-desa pesisir, baik dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah (LSM), maupun proyek-proyek pengembangan masyarakat dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut lainnya. Termasuk pula bagi para pemimpin formal dan nonformal desa, motivator desa, guru-guru sekolah menengah, bahkan siswa dan mahasiswa, sebagai bahan acuan dalam bekerja dengan masyarakat. Studi kasus ini diharapkan pula dapat menambah pengetahuan mereka dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tingkat desa serta dalam program-program pembangunan masyarakat pada umumnya

Dalam studi ini digambarkan proses dan langkah-langkah PSWP-BM dilakukan berikut pembelajarannya, mulai dari identifikasi isu, persiapan perencanaan, adopsi rencana pengelolaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, hingga tahapan pemandirian masyarakat dalam melanjutkan program pengelolaan setelah fasilitasi dari proyek berakhir. Termasuk pula di dalamnya inisiatif penyusunan peraturan yang mendukung kegiatan PSWP-BM, mulai dari Peraturan Desa, Perda Kabupaten, hingga Perda Provinsi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah di Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yang baik selama lebih dari 6 tahun. Terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan pengelola di desa-desa lokasi Proyek, dan seluruh *stakeholders* yang telah terlibat aktif dan membantu Proyek Pesisir dalam kegiatan di daerah. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2003

Penulis

Ringkasan

Indonesia memiliki garis pantai 81.000 kilometer, merupakan negara kedua setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 6000 desa pesisir, yang penduduknya amat menggantungkan kehidupan pada kondisi dan layanan sumberdaya pesisir di sekitar mereka. Meskipun demikian, praktik-praktik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat di dalam negeri ternyata belum banyak ditemukan apabila dibandingkan dengan negara lain yang telah banyak melaksanakannya, seperti Filipina dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Di Indonesia, pengelolaan berbasis masyarakat di sektor perikanan, pesisir, dan kelautan masih dalam tahap awal.

Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten, memberikan peluang yang besar bagi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan berbasis masyarakat. Selain itu, terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan seiring perubahan pemerintahan di Indonesia setelah era reformasi telah mendorong pemerintah pusat dan daerah mengembangkan pendekatan pembangunan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama (*co-management*) berbasis masyarakat.

Pendekatan berbasis masyarakat yang *co-management* ini mulai dirintis oleh Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Project – CRMP*). Proyek ini mendasarkan programnya pada pendekatan partisipatif dan desentralistik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Setelah lebih dari 6 tahun melaksanakan programnya, Proyek Pesisir berhasil mengembangkan berbagai model pengelolaan berbasis masyarakat. Model/contoh-contoh pengelolaan berbasis masyarakat ini pengalamannya dipaparkan dalam studi kasus ini.

Berbagai model pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat di Sulawesi Utara adalah:

- Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM)
- Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
- Aturan-aturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, seperti Peraturan Desa dan Peraturan Daerah.

Tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM) adalah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM dimulai dari suatu pemahaman bahwa

masyarakat memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik. Yang dibutuhkan tinggal dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berkelanjutan bagi tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka.

Studi kasus ini memaparkan langkah-langkah proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis masyarakat, yaitu:

1. Identifikasi Isu
2. Persiapan Perencanaan
3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
4. Pelaksanaan dan Penyesuaian
5. Pemantauan dan evaluasi

Selain itu, dipaparkan pula pentingnya pendamping masyarakat dalam memfasilitasi program antara pelaksana program dengan *stakeholders* di dalam masyarakat. Pada bagian akhir suatu program, terdapat tahapan yang perlu dilakukan, yang dikenal sebagai tahap keluar atau pemandirian masyarakat. Pada periode ini, masyarakat sudah mencapai tingkat kemandirian dalam meneruskan PSWP-BM. Masyarakat mengambil peran, kontrol, dan tanggung jawab utama dalam mengelola sumberdaya, serta mengupayakan bantuan dana secara mandiri. Lewat program ini, persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan dan kemandirian program pengelolaan diharapkan sudah matang.

Berbagai pembelajaran telah diperoleh dalam program PSWP-BM di Provinsi Sulawesi. Salah satunya bahwa rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pengelolaan merupakan hal yang penting. Partisipasi nyata dari mereka amat dibutuhkan sejak tahap-tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat desa di wilayah pesisir, apabila kemampuan dan kapasitas mereka dilatih dan diperkuat serta diberi kepercayaan secara partisipatif, maka mereka akan mampu bertanggung jawab dengan baik dalam mengelola sumber dana dan sumberdaya secara baik, mampu melakukan pemantauan kondisi sumberdaya pesisir secara tepat, serta dapat mengubah diri dari pemanfaat murni sumberdaya menjadi pengelola sumberdaya mereka sendiri. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelompok yang bertugas untuk melaksanakan rencana pengelolaan harus mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama selama proses persiapan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa kapasitas pengelolaan yang cukup, kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin.

Pendahuluan

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan yang sudah banyak dipakai dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Pendekatan ini secara luas digunakan di wilayah Asia Pasifik seperti di Filipina dan negara-negara di Pasifik Selatan. Keberhasilan pendekatan ini semakin banyak dan didokumentasikan secara baik (Polotan-de la Cruz, 1993; Buhat, 1994; Pomeroy, 1994; White et.al., 1994; Ferrer et.al., 1996; Pomeroy and Carlos, 1997; World Bank, 1999).

Di Indonesia, contoh program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM) belum banyak ditemukan. Padahal, keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat telah banyak dikenal dalam kegiatan irigasi, hutan masyarakat, dan pertanian. Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sektor perikanan dan kelautan umumnya masih dalam tahap pengembangan. Hal ini kemungkinan akibat rumitnya sistem sumberdaya pesisir dan laut serta struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir. Di negara-negara yang sistem pemerintahannya semakin mengarah pada desentralisasi dan otonomi lokal, pendekatan berbasis masyarakat dapat merupakan pendekatan yang lebih tepat guna, lebih mudah, dan dalam jangka panjang dapat terbukti lebih efisien dan efektif dalam segala hal.

Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten, memberikan peluang yang besar bagi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan berbasis masyarakat. Selain itu, terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan perubahan pemerintahan di Indonesia setelah era reformasi, mendorong pemerintah pusat dan daerah mengembangkan pendekatan pembangunan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama (co-management) berbasis masyarakat.

Upaya-upaya adaptasi pendekatan berbasis masyarakat seperti ini, dalam konteks pembangunan dan pengelolaan di Indonesia, sudah dimulai di Sulawesi Utara sejak tahun 1997 (Crawford & Tulungen, 1998a, 1998b, 1999a, 1999b,; Tulungen et.al., 1998, 1999; Crawford et.al, 1998) lewat Proyek Pesisir (Coastal Resources Management Project - CRMP). Proyek Pesisir, yang dimulai sejak tahun 1997, mendasarkan programnya pada pemikiran/hipotesis bahwa pendekatan partisipatif dan desentralistik akan mengarah lebih pada berkelanjutan dan adil/seimbang nya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia.

Di Sulawesi Utara, Proyek Pesisir mempunyai kegiatan di tiga lokasi (empat desa) yang dipilih bersama Tim Kerja Provinsi. desa-desa yang tersebut adalah Bentenan dan Tumbak, Talise, dan Blongko. Setelah melakukan kegiatan dan upaya selama 6 (enam) tahun di Sulawesi Utara, contoh-contoh praktek pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, yang mendukung validitas pemikiran/hipotesa dari Proyek Pesisir.

Tujuan dan Kerangka Kerja Konsep PSWP-BM

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM) bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik. Yang dibutuhkan tinggal dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berkelanjutan bagi tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka.

Keuntungan potensial utama dari PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas kesinambungannya (*sustainability*). Sedangkan kelemahannya terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang membutuhkan waktu cukup lama, karena sifat dasar PSWP-BM yang antara lain:

- Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan penegakan aturan.
- Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya, yang memungkinkan mereka mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan jangka panjang.
- Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat mengemukakan strategi sesuai keinginan dan kondisi mereka.
- Menuntut fleksibilitas agar dapat dengan mudah disesuaikan dan diubah berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- Membutuhkan pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan keahlian lokal/tradisional dalam pengembangan strategi.
- Menuntut kemitraan (*partnership*) yang dinamis dengan berbagai pihak dalam masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang jelas.
- Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan bagi PSWP-BM dan dukungan dana maupun bantuan teknis dari pemerintah setempat.

Di Sulawesi Utara, tujuan Proyek Pesisir adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang baik/efektif —lewat pengembangan dan penggunaan metode, strategi, kegiatan perencanaan, dan aturan-aturan lokal— yang dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir, dan meningkatkan atau mempertahankan kondisi sumberdaya pesisir yang banyak orang menggantungkan kehidupannya di sana.

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya langsung untuk mencapai: (1) peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir; (2) memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal; dan (3) memperkuat kapasitas lembaga lokal.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun-tahun pertama kegiatan proyek, program lapangan Sulawesi Utara kemudian memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat yakni:

- Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat (DPL-BM) tingkat-desa
- Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa
- Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat tingkat desa.

Hasil yang ingin dicapai dari berbagai pendekatan ini adalah antara lain:

- Menguatnya kapasitas lembaga dan perorangan setempat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.
- Membaiknya perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat lokal.
- Semakin besarnya partisipasi stakeholders dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumberdaya pesisir.
- Stabil dan membaiknya kondisi habitat dan sumberdaya pesisir.
- Lestari dan seimbangya kesempatan-kesempatan ekonomis bagi masyarakat setempat yang tergantung kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan yang baik di wilayah pesisir.

Kerangka kerja konsep (conceptual framework) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu
2. Persiapan Perencanaan
3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
4. Pelaksanaan dan Penyesuaian
5. Pemantauan dan evaluasi

Alur model program bagi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat dapat dijelaskan dalam Lampiran 1. Model ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh program, menyangkut kegiatan yang dilakukan dan hasil dari tiap kegiatan. Setiap langkah dalam proses memiliki sejumlah capaian antara yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Proses dan kegiatan serta capaian ini akan mengarah pada tujuan akhir atau dampak yang dihasilkan. Lampiran 2 dan 3 merupakan versi yang lebih rinci dari Lampiran 1, yang merinci langkah-langkah utama, kegiatan dan hasil yang diharapkan dalam rangka pembuatan, dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat.

Proses Program PSWP-BM

Berdasarkan model konsep dan kerangka kerja tersebut, Proyek Pesisir melakukan berbagai seri kegiatan sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Isu

Identifikasi masyarakat: Satu rangkaian kriteria ditetapkan dan dipakai untuk memperkirakan penerimaan secara cepat dan mudah metode/cara pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan juga dalam membangun kapasitas masyarakat dalam mengambil alih tanggungjawab pengelolaan. Kriteria tersebut antara lain:

- Tingkat tekanan atau derajat kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan yang tidak lestari (rendah/kecil).
- Ikatan sosial dan politik masyarakat (tinggi/kuat).
- Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir (tinggi).
- Kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumberdaya (tinggi).
- Ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan dan tujuan program (tinggi).

Kriteria di atas dijadikan acuan oleh Tim Kerja Provinsi dan Proyek Pesisir untuk menentukan 3 lokasi di 4 desa (Blongko, Bentenan-Tumbak, Talise) sebagai model/ccontoh yang akan dikembangkan, selain kemudahan koordinasi, model pulau kecil, keragaman isu-isu utama dan keragaman kelompok etnis, serta strategi diseminasi model/ccontoh.

Orientasi dan penyiapan masyarakat: Sebelum rencana pengelolaan dibuat, upaya awal perlu dilakukan untuk menerangkan dan menjelaskan tujuan program, proses yang akan dilalui, dan manfaat yang akan diperoleh kepada masyarakat. Keterlibatan dan hubungan yang terus-menerus dalam masyarakat sangat penting dan dilakukan dengan penempatan secara tetap pendamping masyarakat (penyuluh lapangan) yang berasal dari di luar desa dan melibatkan seorang asisten/motivator desa dari masyarakat setempat. Tenaga lapangan ini harus ditopang atau dibantu oleh tim teknis yang akan memberikan bantuan atau pelayanan teknis untuk isu-isu tertentu jika diperlukan.

Orientasi dan penyiapan masyarakat ini diisi dengan berbagai kegiatan pendidikan lingkungan hidup (penyuluhan), pelatihan (training), lokakarya (workshop), studi banding, serta keikutsertaan dalam seminar, konferensi, dan rapat (secara regional maupun nasional). Pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang diberikan kepada masyarakat berupa penyuluhan mengenai terumbu karang, konsep daerah perlindungan, hutan, hukum lingkungan, habitat dan ekosistem wilayah pesisir, dan pengorganisasian masyarakat.

Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan pengamatan terumbu karang (Manta Tow), pelatihan menyelam, pelatihan pengukuran dan pemantauan profil pantai, pelatihan pengelolaan keuangan, serta pelatihan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu (ICM Training). Lokakarya yang dilakukan seperti lokakarya penyusunan profil desa, lokakarya penyusunan rencana pengelolaan desa, lokakarya kelompok pengelola, dan sebagainya. Contoh studi banding adalah studi banding DPL di Pulau Apo, Filipina, pengelolaan hutan bakau di Sulawesi Selatan, dan studi banding usaha kecil dan wisata alam di Bunaken, Malalayang, dan Manado. Juga kunjungan silang (cross visit) antarmasyarakat desa. Orientasi dan penyiapan masyarakat lewat PLH, pelatihan, studi banding, dan keterlibatan dalam seminar, konferensi dan pertemuan-pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat desa dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Pengumpulan data dasar: Data dasar mengenai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan diperlukan untuk menentukan atau menilai pencapaian hasil dari adanya intervensi proyek. Dalam rangka kesepakatan dan mencoba model dan cara yang baik di lokasi percontohan, perlu dilakukan survei dan analisis secara mendalam yang memadukan teknik empiris dan sistematis dengan tehnik partisipatif. Hal sama juga harus dilakukan di desa kontrol untuk membandingkannya dengan desa percontohan tempat intervensi proyek dilakukan. Data dasar yang dikumpulkan antara lain data sosial, ekonomi, lingkungan, dan sejarah. Selain data dasar, dilakukan pula studi teknis seperti potensi sumberdaya (mangrove, hutan dan hidupan liar, mariculture) serta strategi PLH di masyarakat.

Identifikasi, prioritas, dan penetapan isu: Identifikasi isu dilaksanakan berdasarkan penilaian dari tenaga teknis ahli/pakar, berdasarkan survei/studi lingkungan dan sosial ekonomi di atas. Identifikasi isu juga dilakukan oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal dan informal, diskusi mendalam dengan informan-informan kunci, diskusi dengan masyarakat umum dari berbagai tingkatan dan kelompok stakeholders, serta observasi langsung pendamping masyarakat dan asisten penyuluh lapangan.

Perkiraan empiris mengenai beratnya isu dibuat oleh tim teknis. Persepsi mengenai berat tidaknya isu dan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan ditentukan oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal maupun informal, diskusi dan lokakarya. Pemantauan (monitoring) partisipatif dimulai oleh dan bersama masyarakat, tergantung pada isu (misalnya pemantauan dan pemetaan terumbu karang, pemantauan pantai akibat erosi pantai). Studi teknis mengenai isu-isu spesifik dapat dilakukan oleh konsultan luar jika diperlukan. Informasi tambahan yang lebih detail diperlukan bagi penentuan rencana pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Hasil studi teknis dan rekomendasinya harus disampaikan kepada masyarakat. Isu-isu yang diidentifikasi baik oleh masyarakat maupun yang didukung oleh studi teknis dan survei tenaga teknis serta penyuluh lapangan lantas diverifikasi, dikumpulkan, dan diprioritaskan oleh masyarakat. Produk akhirnya didokumentasikan dalam bentuk Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa (Kasmidi et.al., 1999; Tangkilisan et.al., 1999). Profil ini dipakai sebagai dasar bagi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan terpadu berbasis masyarakat di masing-masing lokasi/desa. Contoh profil

desa dapat dilihat dalam dokumen “Contoh Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat” (Tulungen, 2003), pada Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri PSWP-BM

3.2. Persiapan Perencanaan

Pilihan yang dikembangkan adalah kombinasi dari masukan dan usulan teknis para staf teknis, yang dipadukan dengan rekomendasi dan ide/pikiran dari masyarakat sendiri. Adanya komitmen dan kesepakatan dari sebagian besar masyarakat mutlak diperlukan sebelum kegiatan dan strategi ditetapkan untuk dilaksanakan. Untuk memulai rencana pengelolaan, diperlukan kelompok inti yang merupakan perwakilan masyarakat, yang akan merumuskan rencana pengelolaan tersebut.

Sebelum kelompok inti bekerja, terlebih dahulu mereka dibekali dengan pelatihan penyusunan rencana pengelolaan. Kelompok inti juga mencoba membuat draft rencana pengelolaan yang akan menjadi pemicu dan dasar diskusi konsultasi dengan masyarakat dan Pemerintah Desa. Hasil dari draft rencana pengelolaan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat lewat pertemuan dan konsultasi, baik secara formal dan informal, untuk mendapatkan masukan, tambahan, dan koreksi dari masyarakat, pemimpin formal dan informal, Pemerintah Desa, dan stakeholders yang ada di desa.

Pelaksanaan awal untuk mencoba prosedur dan struktur pengelolaan, dan membangun dukungan bagi rencana jangka panjang serta rencana yang menyeluruh, dikembangkan dan diusulkan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan proyek. Bentuk kegiatan pelaksanaan awal amat beragam, seperti penanaman bakau, pembuatan fasilitas Mandi-Cuci-Kakus (MCK), pengadaan air bersih, dan pembuatan tanggul; atau diusulkan oleh tim proyek dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan masyarakat seperti: pembersihan Bintang Laut Berduri (Crown of Thorns -CoTs), pembuatan daerah perlindungan laut (DPL), dan pembuatan pusat informasi. Penjelasan tentang kegiatan pembersihan Bintang Laut Berduri dapat merujuk pada buku “Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri” (Fraser, et. al., 2003), yang terdapat dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri PSWP-BM.

3.3. Persetujuan Perencanaan dan Pendanaan

Masyarakat menentukan prioritas isu dan tujuan bagi pengelolaan dan kegiatan. Penyuluh lapangan dapat menambahkan/memberikan masukan, rekomendasi, dan tambahan ide tetapi keputusan dan pilihan adalah hak dan tanggungjawab masyarakat. Proses penetapan dan kesepakatan diupayakan setelah ada konsensus dan dukungan dari mayoritas masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan adil agar semua pihak memahami bahwa proses penentuan/pengambilan keputusan diketahui dan didukung oleh mayoritas masyarakat dan stakeholders. Rencana pengelolaan dan aturan lokal harus disepakati secara formal oleh unsur pemerintah dan kepala desa. Aturan formal tersebut adalah dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang ditandatangani oleh

Kepala Desa dan diketahui oleh BPD (Badan Perwakilan Desa), atau wakil masyarakat melalui rapat musyawarah desa. Pemerintah setempat bersama-sama dengan anggota KTF (Kabupaten Task Force) kemudian memutuskan untuk mengadopsi rencana pengelolaan tersebut juga sebagai rencana pembangunan desa.

Idealnya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana pengelolaan, usulan dananya akan diintegrasikan dalam proses DIP/DUP (Daftar Isian Proyek/Daftar Usulan Proyek), yang diawali dengan rapat Musyawarah Pembangunan (Musbang) di desa dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di kecamatan sampai kabupaten, yang kemudian dianggarkan dalam APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah). Sedangkan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya yang besar dapat dilakukan secara swadaya masyarakat, lewat upaya yang sah dari masyarakat maupun lewat Pendapatan Asli Desa. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dapat dibiayai oleh desa dan belum masuk dalam APBN/APBD dapat diusahakan oleh badan/kelompok pengelola melalui bantuan lain seperti lembaga/donatur di dalam dan di luar desa/daerah.

3.4. Pelaksanaan dan Penyesuaian

Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pengelola sumberdaya utama. Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh proyek maupun pemerintah kabupaten/provinsi jika diperlukan atau bila tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, misalnya pengaspalan jalan dan pembuatan sarana air bersih.

Kegiatan dalam rencana pengelolaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan perubahan yang terjadi di desa. Penyesuaian harus dilakukan secara terbuka, atas persetujuan masyarakat dan kelompok pengelola, bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dilaksanakan secara terbuka, disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, dan dipresentasikan kepada pemerintah di tingkat kabupaten untuk diketahui dan didukung. Pelaksanaan rencana kerja tahunan dilaksanakan oleh masyarakat melalui kelompok/badan yang ada di desa yang bertugas/ditugaskan untuk itu.

3.5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari setiap kegiatan. Proses dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi telah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan. Tinjauan (review) tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai, sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan berikutnya. Pelaporan terhadap pelaksanaan dan penggunaan keuangan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat

dengan membuat laporan formal, yang diumumkan pada pertemuan-pertemuan formal dan informal, serta papan-papan informasi desa. Pemerintah Desa dan BPD atau lembaga lain di desa bertanggung jawab mengevaluasi dan mengaudit program dan penggunaan dana.

Hasil evaluasi ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jika dalam pelaksanaan terdapat temuan-temuan yang tidak sesuai dengan rencana kerja, atau terdapat penyimpangan penggunaan keuangan, maka BPD dan Hukum Tua (Kepala Desa) harus menetapkan solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

3.6. Isi Rencana Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

Mengikuti proses dan langkah-langkah di atas, maka masyarakat dan Pemerintah Desa di tiga lokasi (empat desa) Proyek Pesisir telah berhasil membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan tingkat desa. Penetapan itu dilakukan secara partisipatif, terbuka, transparan, dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (kabupaten dan provinsi).

Disusunnya Rencana Pembangunan dan Pengelolaan di empat desa tersebut memiliki alasan tersendiri. Bentenan dan Tumbak merupakan dua wilayah administrasi desa yang memanfaatkan wilayah laut sama, sehingga untuk isu yang bersentuhan dalam pengelolannya akan dilakukan bersama. Desa Talise mempunyai dua pulau dalam satu wilayah administrasi desa dan keduanya memiliki tradisi serta budaya yang berbeda sehingga diperlukan keterpaduan pengelolaan. Sedangkan Desa Blongko mempunyai DPL sehingga Rencana Pengelolaan yang dibuat masyarakat desa secara khusus menampilkan pengelolaan DPL (Sondita et. al., 2001).

Struktur dokumen Rencana Pembangunan dan Pengelolaan ini terdiri dari:

- Keputusan Desa mengenai Kesepakatan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
- Gambaran Umum dan Latar Belakang Desa
- Proses Perencanaan dan Tujuan dari Rencana Pengelolaan
- Visi Masyarakat Desa
- Pengelolaan Isu-isu (berisi gambaran mengenai isu, tujuan, strategi, kegiatan dan hasil yang diharapkan)
- Struktur Kelembagaan
- Pemantauan dan Evaluasi

Instansi pemerintah daerah yang tergabung dalam Kabupaten Task Force (KTF) memandang bahwa rencana pengelolaan desa ini dapat dipakai sebagai proses percobaan perencanaan bottom-up dalam jiwa UU No. 22 Tahun 1999 yang baru, yang apabila berhasil dapat diterapkan dalam program pembangunan secara umum di Sulawesi Utara. Ada keinginan yang kuat dari lembaga-lembaga ini untuk mencoba dan mengadopsi pendekatan pengelolaan ini secara adaptif yaitu bahwa berbagai perubahan dalam prosedur dan struktur pelaksanaan mungkin diperlukan dalam rencana pengelolaan ini. Terdapat pula kemauan dan antusias yang kuat untuk menjadikan pelaksanaan dari

rencana pengelolaan ini berhasil sehingga dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa lain di Sulawesi Utara.

Berdasarkan rencana pengelolaan ini maka rencana aksi tahunan dibuat oleh badan pengelola. Penentuan prioritas kegiatan dan rencananya, ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desa secara transparan dan terbuka, yang dikoordinasikan oleh badan pengelola. Sedangkan petunjuk, kebijakan, dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari pemerintah daerah (dinas dan instansi yang berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM, perguruan tinggi dan donatur, serta dari pendapatan dan usaha yang sah dari desa maupun lewat swadaya masyarakat.

Di Sulawesi Utara, contoh rencana pengelolaan yang dikembangkan oleh masyarakat sudah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah di desa maupun di tingkat kabupaten dan provinsi, beserta lembaga-lembaga terkait yang ada di daerah. Tahap pelaksanaan rencana pengelolaan ini sudah dimulai dalam Tahun Anggaran 2000. Proyek Pesisir membimbing masyarakat, Pemerintah Desa, dan Badan Pengelola yang dibentuk untuk melaksanakan rencana pengelolaan ini. Bantuan teknis berupa pendampingan dan pedoman dalam membuat rencana aksi tahunan, pelaksanaan, dan pemantauan akan dikembangkan oleh masyarakat bersama-sama pendamping masyarakat Proyek Pesisir.

Untuk mendorong masyarakat dan pemerintah memulai pelaksanaan, Proyek Pesisir telah memberikan bantuan finansial (grant) pada setiap desa. Dana pendamping juga diperoleh dan ditunjang oleh dana masyarakat dan dari pemerintah daerah, baik dari BAPPEDA maupun dinas/instansi terkait lainnya lewat dana APBD/APBN, termasuk bantuan teknis dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Tampilan Rencana Pengelolaan Desa juga dapat dilihat dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri PWP-BM, yakni "Contoh Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat" (Tulungen, 2003).

3.7. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) adalah salah satu model dalam perlindungan sumberdaya wilayah pesisir. DPL-BM, termasuk juga Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) adalah daerah pesisir dan laut yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya, serta dikelola oleh masyarakat setempat. Kegiatan perikanan dan pengambilan merupakan hal terlarang di dalam kawasan ini. Demikian pula akses manusia di dalam kawasan ini diatur atau sedapat mungkin dibatasi. Pengaturan, pembatasan, dan larangan aktivitas tersebut ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk Peraturan Desa.

Contoh-contoh DPL-BM dan DPM antara lain seperti yang terdapat di Desa Blongko, Tumbak, Bentenan, Talise, dan desa-desa pesisir di Kecamatan Likupang Barat dan Timur, dengan luas masing-masing antara 6 - 130 hektare. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan jenis serta luas DPM dan DPL-BM yang sudah ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1. Desa-desanya di Kabupaten Minahasa yang memiliki DPL dan DPM Berbasis Masyarakat.

| No | Desa | Tipe Perlindungan | Luas Zona Inti (Ha) | Luas Zona Penyangga (Ha) | Total (Ha) |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Blongko | DPL (Terumbu dan Mangrove) | 15 | 10 | 25 |
| 2 | Talise | DPL (Terumbu) | 10 | 12 | 22 |
| 3 | Tumbak | DPL (Terumbu) | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Tumbak | DPM (Mangrove) | 16,4 | 56,3 | 72,7 |
| 5 | Bentenan | DPL (Terumbu) | 22 | 8 | 30 |
| 6 | Kalinaun Jaga 3 | DPL (Terumbu) | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Kalinaanun Jaga 4 | DPL (Terumbu) | 3,5 | 2,5 | 6 |
| 8 | Serei | DPL (Terumbu) | 2,6 | 4,3 | 6,9 |
| 9 | Tanah Putih | DPL (Terumbu dan Mangrove) | 13 | 7 | 20 |
| 10 | Tarabitan | DPL (Terumbu) | 10 | 5 | 15 |
| 11 | Pulisan Jaga 1 | DPL (Terumbu) | 7,6 | 6,1 | 13,7 |
| 12 | Pulisan Jaga 2 | DPL (Terumbu) | 8,7 | 4,9 | 13,6 |
| 13 | Gangga 1 | DPL (Terumbu) | 1,6 | 24,4 | 26 |
| 14 | Gangga 2 | DPL (Terumbu) | 1 | 25 | 26 |
| 15 | Airbanua Jaga 1 | DPL (Terumbu) | 10 | 11 | 21 |
| 16 | Airbanua Jaga 2 | DPL (Terumbu) | 5 | 11 | 16 |
| 17 | Libas | DPL (Terumbu) | 22 | 5 | 27 |
| 18 | Libas | DPM (Mangrove dan Terumbu) | 131 | 0 | 131 |
| 19 | Lihunu | DPL (Terumbu) | 13,5 | 4,5 | 18 |
| 20 | Maen | DPL (Terumbu) | 33 | 16 | 49 |
| 21 | Teremaal | DPL (Terumbu) | 14 | 4 | 18 |
| 22 | Maliambao | DPL (Terumbu) | 26 | 20 | 46 |
| 23 | Mubune | DPL (Terumbu) | 8 | 12 | 20 |
| 24 | Sarawet | DPM (Mangrove) | 90 | 0 | 90 |
| 25 | Sonsilo | DPM (Mangrove) | 37 | 0 | 37 |
| 26 | Basaan* | DPL (Terumbu) | 12 | 0 | 12 |

Keterangan:

1. Desa dengan cetak tebal adalah desa pilot (*anchor site*) Proyek Pesisir
2. Desa dengan tanda * adalah lokasi di bawah program JICA

Pembahasan tentang pembentukan DPL dan pengelolannya terdapat pada Seri PSWP-BM lainnya dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, yaitu "Panduan Pembentukan dan Pengelolaan DPL Berbasis Masyarakat" (Tulungen et. al., 2003).

3.8. Peran Pendamping Masyarakat, Tim Teknis, dan Pemerintah Daerah

Satu hal yang diyakini sangat penting dalam membantu mitra kerja —baik di tingkat lokal maupun kabupaten/provinsi— untuk mencapai hasil yang diharapkan adalah mendorong partisipasi yang tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pendamping masyarakat bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan perencanaan berbasis masyarakat yang didukung oleh Proyek Pesisir, konsultan lokal, LSM, dan lembaga-lembaga pemerintah setempat. Pendamping masyarakat, selain bertugas sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan di atas, juga bersama-sama

masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan formal dan informal di desa untuk mengadakan penilaian secara partisipatif menyangkut sejarah, kondisi, dan isu-isu pengelolaan sumberdaya di desa, serta berusaha mencari solusi dan kesepakatan pengelolaan yang tepat.

Pendamping masyarakat dari Proyek Pesisir hidup dan bekerja secara tetap dan penuh dengan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ilmu, dari ilmu kelautan sampai pengembangan masyarakat (pendamping masyarakat dari Proyek Pesisir didominasi oleh sarjana berlatar belakang Ilmu Kelautan dan Perikanan). Walaupun pendamping masyarakat adalah sarjana (S1), investasi untuk mengembangkan kapasitas mereka agar dapat secara efektif berinteraksi dengan masyarakat dan dalam memahami isu pengelolaan sumberdaya pesisir setempat tetap diperlukan. Untuk menjamin proses koordinasi dan pelaporan yang cukup, penyuluh lapangan sebulan sekali mengadakan pelaporan dan pertemuan di kantor Proyek Pesisir.

Pendamping masyarakat tidak tinggal secara permanen di desa sampai proyek selesai. Jika rencana pengelolaan dan/atau aturan telah dikembangkan, disepakati, pelaksanaan dimulai, dan masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup dan terlatih untuk melakukan sendiri rencana pengelolaan dan aturan-aturan mereka, maka pendamping masyarakat ditarik dari lokasi/desa/masyarakat. Mereka kemudian memulai kegiatan perencanaan dan pengembangan (outreach) di desa-desa lain atau sekitar lokasi desa mereka. Lama waktu penempatan pendamping masyarakat di lokasi/desa/masyarakat berkisar antara satu sampai tiga tahun, yang diikuti oleh kunjungan-kunjungan singkat (part time), minimal dalam jangka waktu satu tahun setelah mereka ditarik secara tetap dari lokasi. Untuk meneruskan kegiatan pendamping masyarakat ini, asisten pendamping masyarakat (anggota masyarakat) —yang bekerja sama dan dilatih oleh pendamping masyarakat dan proyek— melanjutkan kegiatan di lokasi sebagai motivator dan katalisator.

Untuk memberikan bantuan teknis kepada pendamping masyarakat, staf Proyek Pesisir, dan masyarakat, dibutuhkan pula tenaga-tenaga teknis (tim teknis) yang mempunyai keahlian dan pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu. Tim teknis (konsultan) Proyek Pesisir terdiri, antara lain:

- Penasihat lokal (local advisor), yang membantu Proyek Pesisir sebagai katalisator dengan pemerintah setempat, universitas, dan lembaga swasta di daerah, serta memberikan masukan teknis terhadap kegiatan/kebijakan pemerintah dan proyek dalam mengembangkan program.
- Konsultan hukum (legal specialist), yang membantu Proyek Pesisir dan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan kebijakan dan peraturan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta membantu masyarakat desa dan pendamping masyarakat dalam merumuskan aturan lokal (ordinances) pengelolaan pesisir, seperti Keputusan Desa untuk DPL dan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Desa.
- Ahli perencanaan pesisir (coastal planner), yang mempunyai keahlian di bidang teknik seperti perubahan garis pantai, erosi, dan pekerjaan umum.
- Konsultan di bidang perikanan (budidaya laut dan ikan), yang memberikan masukan bagi kegiatan-kegiatan di bidang budidaya laut dan mata pencaharian tambahan dibidang perikanan.

- Konsultan agroforestry, yang membantu upaya perlindungan dan konservasi hutan, perlindungan sumber air, dan aktivitas pertanian.

Selain membantu tim/staf Proyek Pesisir, tim teknis juga melakukan pelatihan, penyuluhan, dan memberikan masukan teknis langsung kepada masyarakat.

Pemerintah setempat (khususnya di tingkat desa, tetapi kadangkala juga di tingkat yang lebih tinggi) harus dipandang sebagai stakeholders dalam proses perencanaan. Karena itu mereka perlu dilibatkan sejak awal proses —karena proses partisipasi juga mengharuskan keterlibatan semua stakeholders sejak awal proses. Di masa lampau, banyak proyek berbasis masyarakat yang gagal melibatkan pemerintah setempat sejak awal proses, sehingga meskipun mayoritas masyarakat sudah siap dalam proses perencanaan, akan tetapi ternyata tidak didukung oleh pemerintah setempat. Di lain pihak, banyak kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan.

Peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) sangat penting bagi upaya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di daerah, terutama dalam upaya desentralisasi (otonomi) pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Peran, keterlibatan, dan dukungan pemerintah setempat mulai dari tahap intervensi proyek, penentuan lokasi kegiatan (sebagai lokasi pilot), kebijakan pengelolaan di daerah, keterlibatan langsung dan dukungan pada program yang dikembangkan oleh proyek, hingga keterlibatan dan dukungan kepada masyarakat di desa terhadap upaya yang dilaksanakan masyarakat, sangat menentukan keberhasilan program di lapangan.

Pemerintah daerah setempat juga berperan dalam memberikan bantuan teknis maupun pendanaan (dana pendamping) bagi kegiatan dan program yang diusulkan serta disepakati oleh masyarakat. Bantuan teknis dan dana seperti ini dipandang oleh masyarakat dan pemerintah di desa sebagai keseriusan dari pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) dalam mendukung program di lapangan. Peran utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dalam menyetujui rencana pembangunan dan pengelolaan serta keputusan desa, mengadopsi rencana pembangunan dan pengelolaan desa, serta replikasi contoh/model yang dikembangkan di desa-desa contoh (field sites) ke desa, kecamatan, dan kabupaten lain di Sulawesi Utara.

Dalam mengoptimalkan dan memadukan peran pemerintah daerah, dibentuklah Provincial Working Group (Tim Kerja Provinsi), yang terdiri dari instansi terkait di tingkat provinsi, yang kemudian menjadi Provincial Advisory Committee (Tim Penasihat Provinsi) dan Komite Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu. Tim yang sama juga dibentuk di tingkat kabupaten, yang diberi nama Kabupaten Task Force (KTF), juga beranggotakan dinas dan instansi terkait di kabupaten serta unsur dari universitas dan LSM. Perbedaan fokus peran antara Tim Penasehat Provinsi dan KTF terletak pada fungsi koordinasinya. Di tingkat provinsi, tim/komite berperan terutama untuk fungsi memberikan nasihat dan kebijakan provinsi, sedangkan KTF menekankan pada koordinasi kegiatan pelaksanaan di lapangan.

3.9. Keberlanjutan dan Kemandirian PSWP-BM

Tahap ini dikenal sebagai tahap keluar atau pemandirian masyarakat. Pada periode ini, masyarakat sudah mencapai tingkat kemandirian dalam meneruskan PSWP-BM. Masyarakat mengambil peran, kontrol, dan tanggung jawab utama dalam mengelola sumberdaya, serta mengupayakan bantuan dana secara mandiri. Lewat program ini, persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan dan kemandirian program pengelolaan diharapkan sudah matang.

Langkah atau tahapan yang perlu dilakukan masyarakat dan lembaga pengelola dalam menjamin keberlanjutan dan kemandirian PSWP-BM adalah:

Membangun Komitmen Kemandirian dan Keberlanjutan; yang dilakukan lewat sosialisasi visi keberlanjutan dan kemandirian. Hal ini dilakukan bersama masyarakat, baik secara formal melalui pertemuan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Desa maupun informal lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang ada di desa, seperti arisan, ibadah, rukun keluarga, dan sebagainya. Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi dan kesempatan yang ada. Semakin banyak pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat dalam proses, akan semakin menjamin besarnya dukungan terhadap usaha keberlanjutan dan kemandirian. Pada kegiatan sosialisasi, hal yang dapat dijelaskan dan didiskusikan dengan masyarakat antara lain tentang siklus atau tahap-tahap pengelolaan secara keseluruhan dan rencana keberlanjutan pengelolaan

Menentukan Visi Kemandirian; dilakukan agar masyarakat memiliki pandangan ke depan mengenai cara melaksanakan program secara berkelanjutan dan mandiri, sesuai kapasitas dan sumberdaya yang tersedia di desa.

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan konsep pengkajian diri sendiri (self assessment) terhadap kapasitas masyarakat dalam melaksanakan keberlanjutan dan kemandirian. Tujuannya adalah mempersiapkan bahan kajian (pertanyaan-pertanyaan) untuk menilai kapasitas dan kesiapan masyarakat dan lembaga yang ada di desa dalam keberlanjutan dan kemandirian. Pengkajian yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian Kelembagaan (*Committee-Self Assessment*); Tujuan pengkajian ini adalah agar Pemerintah Desa dan lembaga pengelolaan pesisir mengetahui kapasitas lembaga dalam PSWP-BM dan menyusun agenda pengisian kekosongan untuk persiapan kemandirian. Prosesnya dilakukan lewat pertemuan diskusi untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola dan Pemerintah Desa, serta kapasitas lembaga pengelolaan. Termasuk di dalamnya agenda kegiatan pembenahan dan pemantapan untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Pertemuan ini harus melibatkan Pemerintah Desa bersama dengan Kelompok Pengelola, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan program pengelolaan. Hasil yang diperoleh berupa kajian tentang kapasitas lembaga, efektivitas pengelolaan oleh lembaga, serta agenda kegiatan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan

lembaga dalam PSWP-BM. Kajian ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di desa yang terkait dengan PSWP-BM seperti Kepala Desa, Kelompok Pengelola, BPD, dan sebagainya.

- b. Pengkajian Masyarakat (*Community-Self Assessment*); Tujuan pengkajian diri sendiri ini adalah agar masyarakat menilai kapasitas diri sendiri dalam melanjutkan PSWP-BM secara mandiri. Prosesnya dilakukan lewat pertemuan informal yang difasilitasi oleh *community organizer* (CO) bersama Kepala Dusun dan Ketua RT/RW di tiap desa. Dalam pertemuan ini, didiskusikan dan dilontarkan beberapa pertanyaan mengenai penilaian dan pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan yang telah atau sedang dilaksanakan, hasil dan manfaat yang dirasakan, kekurangan dan kelemahan yang masih ada, serta saran-saran perbaikan dan pembenahan untuk keberlanjutan program.

Dalam proses ini, terdapat fase pengisian kekurangan (*gap-filling*), yang dilakukan setelah proses pengkajian diri sendiri selesai. Kegiatan ini ditujukan bagi upaya pembenahan dan pematapan kapasitas lembaga dan masyarakat untuk keberlanjutan dan kemandirian program. Kegiatan pada fase ini dapat berupa pembenahan kelembagaan dan penyusunan program/rencana ke depan.

Apabila semua tahapan di atas dapat dilalui, maka masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengelolaan pesisir desa pada akhirnya memiliki cukup pengetahuan dan kemampuan serta akses ke luar desa. Kemampuan ini disertai pula dengan komitmen yang cukup untuk bekerja dan melanjutkan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pencapaian itu perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan secara formal melalui acara penglepasan masyarakat (graduasi) dalam proses pembelajaran PSWP-BM. Kegiatan penglepasan ini juga menandai berakhirnya fasilitasi Proyek Pesisir, yang selama ini melakukan pendampingan dalam tahapan PSWP-BM. Untuk selanjutnya, kegiatan PSWP-BM sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa untuk dilanjutkan.

Keberhasilan ini biasanya diikuti dengan acara penglepasan, sebagai wadah untuk memanjatkan syukur, mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaan desa. Acara tersebut dapat memperkuat motivasi dan komitmen masyarakat serta dukungan pemerintah daerah, dan sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat atas keberhasilan yang telah dicapai.

Di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, desa-desa yang menerapkan program PSWP-BM (Blongko, Bentenan, Tumbak, dan Talise) menjalani proses persiapan menuju kemandirian ini dalam waktu kurang lebih setahun. Pada akhirnya, seluruh desa berhasil mencapai tahap kemandirian, ditandai dengan kegiatan penglepasan (graduasi) secara bertahap dari Desember 2002 hingga Januari 2003 di tiap-tiap desa.

Dalam acara graduasi ini, masyarakat menunjukkan rasa bangga dan gembira mereka karena telah berhasil melalui tahapan-tahapan program pengelolaan. Mereka lebih percaya diri dalam melanjutkan tanggung jawab pengelolaan secara mandiri. Setelah masa ini,

masyarakat di desa pilot dapat membagikan pengalaman mereka kepada desa-desa lain yang tertarik menjalankan program PSWP-BM.

Masing-masing desa mengadakan acara khusus yang secara formal menandai kelulusan mereka, juga kegiatan-kegiatan lomba (olahraga dan kesenian) antarmasyarakat, kerja bakti bersama, pencaangan deklarasi atau kesepakatan bersama untuk melanjutkan program secara berkelanjutan, kegiatan peresmian, dan sebagainya. Pemerintah daerah juga dapat menyampaikan penghargaan khusus (sertifikat penghargaan) atas keberhasilan masyarakat dan Pemerintah Desa, dan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program yang akan dilaksanakan desa selanjutnya. Hasil-hasil yang telah dicapai dapat disebarluaskan lewat media masa (koran, radio, dan televisi)

3.10. Perluasan Program (*Scaling Up*)

Sejak tahun 2001, Proyek Pesisir memprakarsai program replikasi dan perluasan (*scaling up*). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh selama lima tahun dari empat desa pilot tersebut, dan penerimaan yang luas tentang konsep pengelolaan berbasis masyarakat ini oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Program ini dirancang untuk mengembangkan hasil-hasil pembelajaran tersebut, sekaligus menguji dan mengidentifikasi model pendekatan inisiatif pengelolaan berbasis masyarakat ini. Juga, dalam upaya melembagakannya pada pemerintah daerah setempat. Hasilnya, Proyek Pesisir mengidentifikasi Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur sebagai lokasi, yang secara ekologis dan politis penting, untuk memperkenalkan dan mendukung inisiatif pengelolaan berbasis masyarakat.

Contoh-contoh model PSWP-BM yang telah dipraktikkan di empat desa sebelumnya, mulai dicobakan dengan prinsip-prinsip yang sama di 25 desa, namun tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa masing-masing. Waktu pencapaian tiap tahapan dalam program perluasan ini bervariasi, namun secara umum lebih cepat dibandingkan yang pencapaian yang sama di empat desa pilot. Hal ini mengingat hasil-hasil pembelajaran yang telah diperoleh dari kegiatan sebelumnya di empat desa dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan program PWSP-BM di desa-desa perluasan program.

Beberapa hasil yang diperoleh dari desa-desa peserta perluasan program tersebut adalah:

- Ditetapkannya 19 Daerah Perlindungan Laut (DPL)
- Ditetapkannya 4 (empat) Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)
- Tersusunnya 9 (sembilan) Rencana Pengelolaan tingkat Desa
- Terbentuknya Kelompok Pengelola Pesisir dan Pusat Informasi Pesisir di 19 desa

Saat ini, sebagian desa-desa peserta sudah melalui tahap adopsi/penerimaan secara formal, sedangkan yang lain baru akan memasuki tahap pelaksanaan. Masih dibutuhkan waktu untuk melihat apakah keberhasilan dalam proses pembelajaran pada tingkat desa di lokasi pilot akan berhasil pada tingkat yang lebih luas, bahkan pada tingkat kabupaten dan provinsi.

3.11. Dukungan Peraturan dalam PSWP-BM

Program PSWP-BM bertujuan ditujukan agar masyarakat lokal dan Pemerintah Desa mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumberdaya lokal. Pada faktanya, mereka belum mempunyai sarana dan kewenangan yang memadai untuk mencapai maksud-maksud tersebut.

Banyak desa di Kabupaten Minahasa telah memiliki daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM), dan melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir melalui proses perencanaan yang matang. Hal tersebut diikuti dengan hadirnya sejumlah peraturan desa (Perdes) yang bertujuan mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di masing-masing wilayah desa. Contoh-contoh Peraturan Desa yang telah berhasil ditetapkan dapat dilihat pada buku "Contoh Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat" (Tulungen, 2003) dalam Seri PSWP-BM, dan dokumen-dokumen yang lebih lengkap lainnya dalam Seri Reformasi Hukum.

Tiada dukungan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi dalam mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumberdaya lokal, termasuk belum adanya aturan-aturan yang mendukung, menjadikan kegiatan PSWP-BM menjadi lemah dan tidak mempunyai kekuatan dalam mengatur seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam dan di luar desa. Karena itu, suatu peraturan berikut fungsi, peran, dan mekanisme lembaga yang memfasilitasi terlaksananya program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu perlu dibentuk di tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Proyek Pesisir terlibat aktif memfasilitasi inisiatif DPRD Kabupaten Minahasa menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di tingkat kabupaten. Dalam prosesnya, pembuatan Perda ini dilaksanakan lewat beberapa tahapan, yakni:

1. Penyampaian permasalahan wilayah pesisir
2. Pertemuan-pertemuan informal antara *stakeholders* (Pemerintah, Swasta dan masyarakat/LSM) untuk merumuskan permasalahan pokok di wilayah pesisir Kabupaten Minahasa.
3. Diskusi formal dengan DPRD Kabupaten Minahasa
4. *Workshop* (lokakarya) bersama Dewan Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengembangan Daerah (Bangda), Konsultasi Rancangan Undang-Undang Pesisir dan Laut di Anyer Jakarta
5. Penulisan draft akademik dan kerangka teoritis
6. Penulisan konsiderans dan draft substansi
7. Seminar-seminar dengan melibatkan masyarakat local, pihak swasta, Perguruan Tinggi, anggota legislative, pihak Kepolisian dan Angkatan Laut (penyidik), Kejaksaan (penuntut umum) dan Pengadilan (hakim)
8. Pembahasan draft substansi/batang tubuh Ranperda
9. Perubahan draft substansi/batang tubuh Ranperda berdasarkan hasil-hasil diskusi formal
10. Kampanye dan sosialisasi draft ranperda melalui kunjungan lapangan, kerjasam LSM,

media massa, dialog interaktif di televisi dan radio

11. Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa.
12. Rapat Panitia Musyawarah kemudian Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda
13. Diskusi formal Panitia Khusus
14. Diskusi formal Panitia Khusus membahas Substansi Ranperda bersama LSM, pihak Swasta, dan perwakilan Masyarakat
15. Rapat Panitia Khusus dengan pihak Eksekutif, membahas Ranperda
16. Kunjungan lapangan Panitia Khusus, dalam bentuk tatap muka/diskusi dengan masyarakat di wilayah pesisir
17. Rapat Panitia Khusus, finalisasi Rancangan Peraturan Daerah
18. Rapat Pleno: Pengesahan Ranperda menjadi Perda

Proses yang berjalan selama kurang lebih setahun itu akhirnya menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat, yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa. Perda ini bersifat “payung” bagi desa-desa pesisir yang telah memulai menerapkan model PSWP-BM sejak tahun 1997.

Hal tersebut diikuti pula dengan penyusunan Perda serupa untuk tingkat provinsi. Proses pembuatan Perda tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan lewat jalur inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dibantu oleh Tim Fakultas Hukum UNSRAT serta Proyek Pesisir sebagai konsultan penyusunan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda). Hasilnya, pada tanggal 26 Mei 2003, DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengesahkan Perda Nomor 38 Tahun 2003 Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengelolaan Pesisir dan laut Terpadu Berbasis Masyarakat. Peraturan tersebut dapat dilihat pula pada buku “Contoh Dokumen Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir” Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Reformasi Hukum.

Pembelajaran dalam PSWP-BM di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

- K**egiatan-kegiatan proyek di lapangan telah mendapatkan sejumlah besar produk (seperti laporan-laporan teknis, dokumen profil dan rencana pengelolaan, masyarakat dan staf pemerintah setempat yang telah dilatih, dan sebagainya) dan yang lebih penting adalah hasil (outcome) yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan. Hasil-hasil penting yang diperoleh dan nyata di desa-desa proyek, antara lain:
- Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai isu-isu pengelolaan pesisir dari masyarakat.
 - Konsensus dan dukungan dari anggota masyarakat dan pemimpin mengenai isu-isu prioritas yang perlu segera dilaksanakan, termasuk tujuan dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan dan mengembangkan potensi dan peluang.
 - Perubahan perilaku menyangkut masyarakat dalam melindungi dan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan sudah mulai tampak (misalnya menurunnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan peledak dan racun dalam menangkap ikan, berkurangnya aktivitas penambangan karang, adanya perlindungan terumbu karang, dan kegiatan perlindungan dan penanaman kembali hutan mangrove)
 - Menguatnya kapasitas masyarakat dan lembaga di tingkat desa dalam pengelolaan sumberdaya.
 - Dukungan pemerintah terhadap upaya perencanaan dan pengelolaan berbasis masyarakat dan bottom-up mulai dari desa, kabupaten, dan provinsi.
 - Adanya dukungan peraturan perundangan mulai Peraturan Desa, Perda Kabupaten, hingga Perda Provinsi, dalam bidang pengelolaan berbasis masyarakat, kelompok pengelola yang dibentuk dari tingkat desa, kabupaten dan provinsi yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya wilayah pesisir.
 - Kesiapan dan komitmen masyarakat dan pemerintah desa untuk melanjutkan program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat

Di setiap desa pilot Proyek Pesisir, contoh spesifik hasil nyata di lapangan seperti terlihat dalam Tabel 2.

Hasil dan kemajuan nyata di atas sudah tampak dan diperoleh. Namun demikian pasca kegiatan Proyek Pesisir banyak upaya yang masih perlu dilakukan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga di tingkat desa, kabupaten dan provinsi dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Mekanisme pengelolaan oleh masyarakat dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan di lapang masih dalam

Tabel 2. Contoh-contoh hasil nyata di tiap desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara

| Bentenan-Tumbak | Talise | Blongko |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penghutan kembali mangrove berjalan dengan baik • Distribusi dan suplay air bersih diperbaiki • Berkurangnya aktivitas pemboman ikan dan penambangan karang • Populasi Bintang Laut Berduri dapat di control • Mata pencaharian pengganti bagi pengguna bahan peledak dan racun sudah dikembangkan (seaweed, perahu motor katinting, budidaya kerang) • Penetapan DPL di Desa Tumbak | <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya banjir di Pulau Kinabohutan lewat konstruksi tanggul • Sertifikat tanah sebanyak 220 telah diperoleh oleh masyarakat • Penambangan karang dan pasir sudah mulai dilarang untuk mencegah erosi • Mata pencaharian tambahan lewat pengadaan motor katinting dan kerajinan tangan mulai dikembangkan • Penanaman kembali mangrove sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. • Penetapan DPL | <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan air bersih semakin baik di desa lewat penambahan pipa dan konstruksi air bersih ke lingkungan penduduk • Kesehatan dan kebersihan masyarakat semakin baik lewat pengadaan MCK dan sumur gali. • Meningkatnya kelimpahan dan spesies ikan di dalam Daerah Perlindungan Laut (DPL) • Meningkatnya tutupan karang di dalam DPL. |

tahap awal. Diakui bahwa keberlanjutan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, sebagaimana dihasilkan dan dicoba di Sulawesi Utara ini, tergantung pada komitmen dan dukungan dari semua stakeholders yang ada, terutama Pemerintah Daerah. Namun melihat keberhasilan pendekatan PSWP-BM yang diterapkan di Sulawesi Utara, hal serupa dapat diterapkan dan diadopsi daerah lain di Indonesia.

Kemajuan dan hasil nyata juga telah diperoleh di tingkat provinsi dan kabupaten dalam melembagakan contoh pendekatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir-berbasis masyarakat ini kedalam program pemerintah setempat. Hasil spesifik yang diperoleh antara lain:

- Meningkatnya dukungan di antara lembaga-lembaga utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten (khususnya Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan) bagi program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir khususnya DPL untuk disebarluaskan dan diterapkan di desa-desa lain.
- Pengakuan bahwa pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir sebagai uji coba dan punya potensi yang baik untuk dipakai sebagai model/contoh program desentralisasi sesuai UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan karena itu keinginan untuk secara adaptif mencoba pendekatan baru untuk mengembangkan strategi penyebarluasan model secara lebih luas lagi (scaling-up model).
- Meningkatnya pemahaman dan diskusi-diskusi mengenai proses dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam keberhasilan upaya penyebarluasan model dalam program pemerintah daerah.
- Upaya penyebarluasan (scaling up) dimulai melalui program dan lembaga yang ada di daerah dan melalui dukungan dan usulan dana APBN/APBD setiap tahun dalam

pengelolaan pesisir di daerah ini.

- Replikasi di tingkat Kabupaten (Minahasa) dan Provinsi (Sulawesi Utara) telah dilakukan, yakni di Kecamatan Likupang Barat dan Timur. Contoh praktik PSWP-BM sudah mulai diadopsi oleh lembaga donor lainnya seperti JICA dan masyarakat sekitar.
- DPRD Kabupaten Minahasa menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 02 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat, demikian juga dengan DPRD Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 (lihat “Contoh Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir” pada Seri Reformasi Hukum, Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003).

Setelah kegiatan Proyek Pesisir berakhir, diharapkan berbagai capaian dan hasil yang dapat dilihat, ditinggalkan, dan diteruskan oleh masyarakat adalah antara lain:

- Daerah Perlindungan Laut (Marine Sanctuary) di tiap desa Proyek Pesisir terbentuk dan dikelola dengan baik.
- Rencana Pengelolaan yang dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan dilembagakan oleh Pemda.
- Pusat Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir di Desa dibangun dan dimanfaatkan.
- Ekoturisme berbasis masyarakat di Likupang Barat dan Timur dan Bentenan berkembang.
- Sanitasi lingkungan masyarakat meningkat.
- Banjir dan erosi berkurang.
- Hutan bakau, terumbu karang dan lamun terpelihara dengan baik.
- Hutan dan satwa langka dilindungi dan lestari.
- Agroforestry dan kegiatan pertanian berkembang dengan baik.
- Sumber mata air terlindungi.
- Kegiatan penangkapan ikan secara destruktif berkurang dan dilarang.
- Adanya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik dalam menentukan areal pemanfaatan diantara pengguna sumberdaya laut di desa (terutama di Talise dan Bentenan -Tumbak)
- Kelompok Pengelola aktif dan berperan dengan baik.
- Masyarakat mampu memahami dan menangani isu secara mandiri.
- Kemampuan dalam melakukan evaluasi secara partisipatif untuk pelaksanaan rencana pengelolaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- Aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan (penegakan aturan).
- Berkembangnya mata pencaharian tambahan yang berkelanjutan.

5

Kesimpulan

Dari pengalaman Proyek Pesisir dalam memfasilitasi PSDWP-BM, sejumlah pelajaran dan kesimpulan dapat dirangkum. Dokumentasi pembelajaran dari kegiatan Proyek Pesisir ini sejak tahun 1999 sudah dilakukan oleh Learning Team Institut Pertanian Bogor (IPB) dan sudah dipresentasikan dalam Learning Team Workshop di Bogor dan ditulis dalam beberapa dokumen (Sondita et.al. 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003). Pelajaran dan kesimpulan yang dipaparkan berikut ini sebagian mungkin sudah dipaparkan dalam dokumen-dokumen tersebut.

1. Rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pengelolaan merupakan hal yang penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari mereka sejak tahap-tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat desa di wilayah pesisir, apabila kemampuan dan kapasitas mereka dilatih dan diperkuat serta diberi kepercayaan secara partisipatif, maka mereka akan mampu bertanggungjawab dengan baik dalam mengelola sumber dana dan sumberdaya secara baik, mampu melakukan pemantauan kondisi sumberdaya pesisir secara tepat, serta dapat diubah dari pemanfaat murni sumberdaya menjadi pengelola sumberdaya mereka sendiri.
2. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelompok yang bertugas untuk melaksanakan rencanan pengelolaan harus mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama selama proses persiapan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa kapasitas pengelolaan yang cukup, kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin.
3. Program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan bersama (co-management) atau secara kolaboratif. Masyarakat dan pemerintah setempat (di desa, kecamatan, dan di tingkat kabupaten) secara aktif bekerja sama selama proses perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi masyarakat akan sangat efektif apabila diintegrasikan sejak awal proses perencanaan, bersamaan dengan keterlibatan aktif dari lembaga pemerintah. Karena belum ada pengalaman dan tradisi yang cukup panjang menyangkut “bottom-up planning” dan partisipasi masyarakat yang nyata, penekanan dan perhatian pada pengembangan kapasitas sangat penting bagi pengelolaan berbasis masyarakat.
4. Dukungan dari pejabat pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi juga akan mempercepat kemungkinan keberhasilan program. Demikian juga di tingkat desa, dukungan yang kuat dari pemimpin setempat pada saat memulai proses perencanaan akan menjamin bahwa proses perencanaan tersebut berhasil dan mempercepat waktu

yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana pengelolaan. Bila dukungan yang kuat dari masyarakat sudah dibangun dan rencana pengelolaan sudah ditetapkan, maka perubahan dalam kepemimpinan di desa akan memberikan dampak yang kecil atau tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan.

5. Ketrampilan dan komitmen pendamping masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan program. Namun demikian, masih diperlukan investasi bagi pengembangan kapasitas dari pendamping lapangan, terutama dalam ketrampilan dan kemampuannya untuk pengembangan masyarakat, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan pesisir terpadu.
6. Pelaksanaan awal perlu dilakukan untuk membangun dukungan masyarakat bagi konsep PSWP-BM, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang membantu masyarakat dalam proses, dan membantu meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. Pelaksanaan awal juga berperan sebagai uji coba pelaksanaan pengelolaan dan proses belajar masyarakat dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Mengingat tujuan pelaksanaan awal di atas, maka jenis pelaksanaan awal tidak terlalu penting, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat dan proses dalam menentukan jenis pelaksanaan awal tersebut. Karena itu kegiatan seperti mendirikan MCK, pusat informasi, menciptakan mata pencaharian tambahan, dan lain-lain cocok untuk ditetapkan/diterima sebagai kegiatan pelaksanaan awal.
7. Lembaga yang terlibat memerlukan kerja sama dan keterlibatan dengan masyarakat sampai tahap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan sudah berjalan dengan baik. Lembaga yang terlibat harus tinggal di lokasi sampai masyarakat sudah benar-benar siap dan memiliki kapasitas yang cukup untuk secara mandiri mengelola sumberdaya mereka. Lembaga atau badan pengelola lokal yang dibentuk sudah harus terorganisasi dan berjalan dengan baik sebelum lembaga yang terlibat ditarik/keluar dari masyarakat. Penarikan lembaga dari desa harus dilakukan secara perlahan-lahan.
8. Metode partisipasi harus menggunakan metode formal dan informal. Secara formal adalah melalui pertemuan masyarakat, diskusi dan presentasi lewat lembaga formal yang ada di desa termasuk sekolah, organisasi keagamaan, arisan, dan sebagainya. Secara informal adalah melalui diskusi tatap muka antara individu, dari rumah ke rumah, di tepi pantai dan jalan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan produktif dalam masyarakat seperti pesta kawin, ulang tahun, kematian, menangkap ikan, panen dan lain-lain. Metode/pendekatan informal memiliki nilai yang sama dan bahkan lebih penting daripada pendekatan formal. Metode informal memerlukan waktu yang panjang, tetapi kadang kala lebih efektif daripada metode formal.
9. Setelah rencana pengelolaan disepakati, maka untuk menjamin keberlanjutannya dibutuhkan jaringan kerja sama dan keterlibatan dengan luar dan lokal yang mendukung rencana pengelolaan, tanpa memandang apakah lembaga tersebut dari LSM, universitas, ataupun lembaga pemerintah.

10. Proses pembuatan rencana pengelolaan dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat memerlukan waktu minimal satu tahun. Rencana berbasis masyarakat yang efektif memerlukan proses partisipatif yang tinggi dan dukungan dari mayoritas masyarakat, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apabila dibentuk kurang dari satu tahun, maka kemungkinan untuk kelanjutan dan keberhasilan sulit dicapai atau dipertahankan. Pengalaman seperti di Filipina menunjukkan bahwa membangun komitmen dan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan berbasis masyarakat memerlukan waktu yang panjang.
11. Perubahan lingkungan dan kondisi sumberdaya tidak akan nampak dalam waktu singkat dan diperlukan beberapa tahun setelah rencana pengelolaan tersebut di sepakati dan diimplementasikan sampai perubahan ini mulai kelihatan. Dampak terhadap masyarakat bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada perubahan lingkungan. Beberapa kasus intervensi khusus, seperti daerah perlindungan laut (DPL), dapat menunjukkan hasil yang lebih cepat seperti dalam peningkatan dan perubahan terhadap kelimpahan ikan, keanekaragaman spesies dan tutupan karang. Perubahannya dapat diperoleh minimal dalam waktu satu tahun. Dalam hal produksi perikanan di sekitar daerah perlindungan laut, sebagaimana pengalaman di Filipina dan Pasifik Selatan, diperlukan waktu antara tiga sampai lima tahun setelah daerah perlindungan ditetapkan.
12. Untuk mencapai keberhasilan pendekatan berbasis masyarakat, hal yang penting adalah perlunya menempatkan secara tetap tenaga penyuluh lapangan yang berpengalaman dan terlatih yang akan memotivasi, mengkoordinasi, memfasilitasi dan melatih masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis-masyarakat di desa. Sumberdaya dan perhatian khusus dalam membangun kapasitas sumberdaya manusia untuk program-program berbasis masyarakat perlu dilakukan sejak awal yang dibarengi dengan pelatihan jangka pendek, yang mampu diterima oleh masyarakat desa dapat dilaksanakan jika ada tenaga penyuluh lapangan yang mencurahkan waktu dan tenaganya secara penuh di desa.
13. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mendorong desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, untuk menjamin kualitas dan kelestarian sumberdaya wilayah pesisir yang banyak penduduk miskin menggantungkan hidupnya di sana. Program-program desentralisasi dapat lebih efektif/murah biayanya, lebih adil/seimbang, dan lebih lestari/berkesinambungan dibanding program-program terpusat (*centralized*).

Daftar Pustaka dan Bahan Bacaan

- Ablaza-Baluyut, E. 1995. The Philippine Fisheries Sector Program. pp. 156-177. In: Coastal and Marine Environmental Management: Proceedings of a Workshop. Bangkok, Thailand, 27-29, March, 1995. Asian Development Bank. pp. 331.
- Balgos, M., T.G. Bayer, B. Crawford, C.R. Pagdilao, J. Tulungen, A.T. White. 2001 (Editors) Proceedings. Philippines-Indonesia Workshop on Community-Based Marine Sanctuaries. Cebu, Philippines & Manado, Indonesia September 2000. CRC Coastal Management Report #2234; PCAMRD Book Series #34. Coastal Resources Center, Narragansett Rhode Island, USA. pp 106
- Buhat, D. 1994. Community-Based Coral Reef and Fisheries Management, San Salvador Island, Philippines. In: White, A. T., L.Z. Hale, Y Renard and L. Cortesi. (Eds.) 1994. Collaborative and Community-Based Management of Coral Reefs: Lessons from Experience. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA. pp. 33-49
- Calumpang H. 1993. The Role of Academe in Community Based Coastal Resource Management: The Case of APO Island. In: Proceedings of the Seminar Workshop on Community-Based Coastal Resources Management: Our Sea Our Life. Lenore P. C. (eds.). Voluntary Services Overseas, New Manila, Quezon City, Philippines.
- Crawford, B.R., I. Dutton, C. Rotinsulu, L. Hale. 1998. Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia: Examples and Initial Lessons from North Sulawesi. Paper presented at International Tropical Marine Ecosystem Management Symposium, Townsville, Australia, November 23-26. pp 299-309
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1998. Metodological Approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi. Working Paper. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1998b. Marine Sanctuary as a Community Based Coastal Resources Management Model for North Sulawesi and Indonesia. Working Paper. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Crawford, B.R., P. Kussoy, A Siahainenia and R.B. Pollnac, 1999. Socioeconomic Aspects of Coastal Resources Use in Talise, North Sulawesi. Proyek Pesisir Publication. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. pp 67.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999a. Scaling-up Initial Models of Community-Based Marine Sanctuaries into a Community Based Coastal Management Program as a Means of Promoting Marine Conservation in Indonesia. Working Paper. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 8 pp.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999b. Concept for a Decentralized Provincial and/or Kabupaten Coastal Management Program in North Sulawesi. Working Paper. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Dutton I.M., D.G. Bengen, J.J. Tulungen. 2001. The Challenges of Coral Reef Management in Indonesia. In Wolanski E., (Ed). Oceanographic Processes of Coral Reefs: Physical and Biological links in the Great Barrier Reef. CRC Press LLC. Florida. USA. pp 315 - 330.

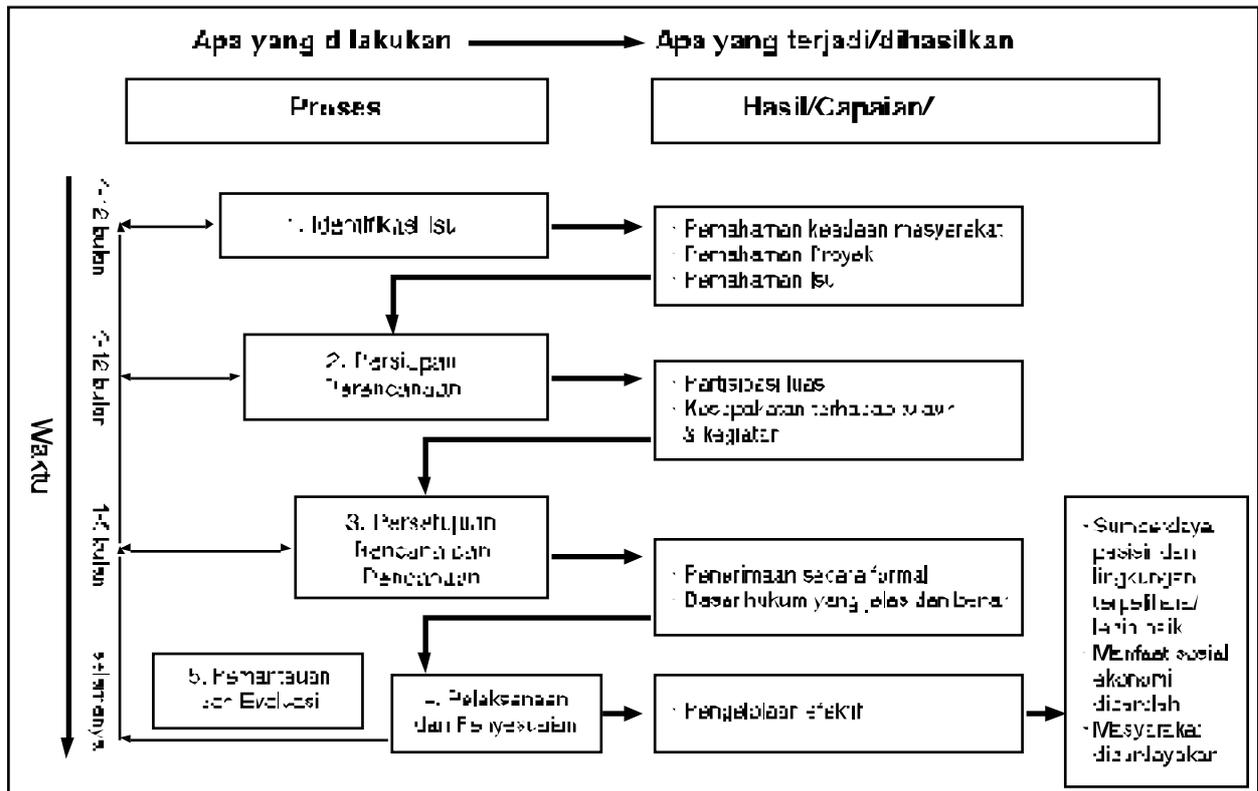
- Ferrer, E. M., L. Polotan-Dela Cruz and M. Agoncillo-Domingo (Eds.). 1996. *Seeds of Hope: A Collection of Case Studies on Community Based Coastal Resources Management in the Philippines*. College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines. pp. 223.
- Fraser, N., B. Crawford, J. Kusen. 2003. *Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri*. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, USA. 34 pp.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, dan N. Mangampe. 1999. *Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA. 31 pp.
- McManus, J.W., C. van Zwol, L.R. Garces and D. Sadacharan. Editors. 1998. *A Framework for Future Training in Marine and Coastal Protected Area Management*. Proceeding ICLARM Conference 57. 54p.
- Patlis, J., R. Dahuri, M. Knight, nd J. Tulungen. 2002. *Integrated Coastal Management In A Decentralized Indonesia: How It Can Work*. *Jurnal Pesisir & Lautan*, Vol 4, no 1, pp 24-39.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. *Rapid Assesment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa*. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, and the US Agency for International Development, pp. 60.
- Polotan-de la Cruz, L. 1993. *Our Life Our Sea*. Proceedings of the Seminar Workshop on Community-Based Coastal Resources Management. February 7-12, 1993, Silliman University, Dumaguete City, Philippines. Voluntary Services Overseas, Quezon City, Philippines. pp. 95.
- Pomeroy, R.S. 1994. *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*. ICLARM Conf. Proc. 45. International Center for Living Aquatic Resources Management, Metro Manila Philippines. pp.185.
- Pomeroy, R.S. and M.B. Carlos. 1997. *Community-Based Coastal Resources Management in the Philippines: A Review and Evaluation of Programs and Projects, 1984-1994*. *Marine Policy*. Vol. 21. No. 5. pp. 445-464.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 1999*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island. 87 pp.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 2000. *Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2000*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island. 170 pp.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 2001. *Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2001*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island. 168 pp.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 2002. *Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2002*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island. 168 pp.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 2003. *Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2003*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island.

- Tangkilisan, N., V. Samuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumul dan S. Tompoh. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 73 pp.
- Tulungen, J.J. 2000. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat di Sulawesi Utara. in Jurnal Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol II, No 3, Oktober 2000. pp 24-41.
- Tulungen, J.J. 2003a. Contoh Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir, University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 131 pp.
- Tulungen J.J. 2003b. Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat Sebagai Salah Satu Model Pengelolaan Perikanan: Contoh Kasus di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Paper Diseminasi dan Lokakarya. Praktek-Praktek Terbaik Kegiatan Pembangunan Sub-Sektor Perikanan Se-Sulawesi. Makassar, 17 - 19 Februari 2003. pp 23.
- Tulungen, J.J. 2003c. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir, University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 29 pp.
- Tulungen, J.J., C. Rotinsulu, M. Dimpudus, dan N. Tangkilisan. 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003 Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir, University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 29 pp.
- Tulungen, J.J., C. Rotinsulu, M. Kasmidi, N. Tangkilisan, M. Dimpudus, M. Sumampouw, D. Karwur, D. Karouw, M. Panelewen, E. Watung, H. Tioho. 2003. Pemantauan dan Evaluasi Dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Paper "Learning Workshop". Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL). Institut Pertanian Bogor (IPB), Maret 2003. pp 28
- Tulungen J.J., T.G. Bayer, B.R. Crawford, M. Dimpudus, M. Kasmidi, C. Rotinsulu, A. Sukmara dan N. Tangkilisan. 2002. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat. CRC Technical Report No 2236. Departemen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia dan University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett Rhode Island, USA. pp 77.
- Tulungen, J.J., P. Kussoy, B.R. Crawford. 1998. Community Based Coastal Resources Management in Indonesia: North Sulawesi Early Stage Experiences. Paper presented at Convention of Integrated Coastal Management Practitioners in the Philippines. Davao City. 10 - 12 Nopember.
- Tulungen, J.J., B.R. Crawford, I. Dutton. 1999 Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat di Sulawesi Utara sebagai Salah Satu Contoh Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pesisir. Paper dipresentasikan dalam Seminar Ilmiah Hasil-hasil Penelitian Unggulan, Likupang, Sulawesi Utara, 15 Desember 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1997. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- White A.T. 1989. Two Community-based Marine Reserves: Lessons Learned for Coastal Management. In: Coastal Area Management in Southeast Asia: Policies, Management Strategies and Case Studies. Proceeding ICLARM Conference 19. T.E Chua and D. Pauly (eds.) 254 p. Ministry of Science and Technology and the Environment, Kuala Lumpur; Johor State Economic Planning Unit, Johore Baru, Malaysia; and International Center for Living Aquatic Resources Mangement, Manila, Philippines. pp 85-96.

- White A.T, A. Cruz-Trinidad. 1998. The Values of Philippine Coastal Resources: Why Protection and Management are Critical. Coastal Resources Management Project, Cebu City, Philippines, 96p.
- White A.T., L. Z. Hale, Y. Renard, L. Cortesi (editors). 1994. Collaborative and Community-Based Management of Coral Reefs: Lesson from Experience. Kumarian Press. West Hartford, Connecticut. USA. pp 124.
- World Bank. 1999. Voices from the Village: A Comparative Study of Coastal Resource Management in the Pacific Islands. Pacific Islands Discussion Paper Series Number 9 (and No. 9A-Summary Report). World Bank, East Asia and Pacific Region, Papua New Guinea and Pacific Islands Country Management Unit. Washington D.C. USA.

Lampiran 1

Model Program PSWP-BM di Sulawesi Utara



Lampiran 2

Tabel 2 . Contoh partisipasi/peran masyarakat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir-Berbasis masyarakat

| Langkah dalam Proses | Partisipasi/Peran Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir |
|-----------------------------------|---|
| Identifikasi Isu | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengumpulan data dasar dan pelatihan pengumpulan data • Menghadiri pertemuan dalam identifikasi isu dan analisis isu • Memberikan masukan terhadap permasalahan dan isu serta berperan dalam penentuan prioritas isu • Berpartisipasi dalam penyusunan dan diseminasi profil desa |
| Persiapan dan Perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup • Berpartisipasi dalam Pelatihan ICM (Pengelolaan Pesisir Terpadu) • Berpartisipasi dalam pembuatan draft rencana pengelolaan • Pengambil keputusan dalam kegiatan pelaksanaan pelaksanaan awal (early action) • Pengambil keputusan dan pemberi masukan dalam rencana pengelolaan desa: <ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi Isu, Visi, Tujuan Pengelolaan - Kegiatan-kegiatan pengelolaan - Sistem monitoring - Struktur kelembagaan • Pemimpin dan pelaksana dalam proses konsultasi, sosialisasi, perbaikan, dan diseminasi draft rencana pengelolaan kepada masyarakat desa, pemerintah setempat, sampai pemerintah dan stakeholders tingkat provinsi |
| Persetujuan Rencana dan Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian dalam semua rapat musyawarah desa untuk menentukan dan menyetujui rencana pengelolaan • Memilih dan menolak sebagian atau keseluruhan rencana pengelolaan desa serta aturan desa bagi pelaksanaan rencana pengelolaan • Bersama-sama dengan pemerintah desa dan kabupaten menyetujui strategi dan pendanaan pelaksanaan rencana pengelolaan • Berpartisipasi dalam peluncuran dokumen rencana pengelolaan desa |
| Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam rapat pembuatan rencana tahunan desa • Berpartisipasi dalam rapat untuk menentukan badan pengelola dan lembaga bagi implementasi rencana pengelolaan • Pengambil keputusan bagi prioritas rencana kerja tahunan desa bagi implementasi rencana pengelolaan |
| Pemantauan dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai pengawas, pemantau, dan pengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana pengelolaan • Berpartisipasi dalam pelatihan pemantauan dan evaluasi • Berpartisipasi sebagai anggota kelompok pemantau dan pengawas pelaksanaan kesepakatan dan peraturan • Bertindak sebagai pemantau dan pengevaluasi rencana tahunan dan pendanaan program • Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat desa |

Lampiran 3

Tabel 3. Kerangka kerja konsep pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu-berbasis masyarakat di Sulawesi Utara

| Langkah | Kegiatan | Hasil yang diharapkan | Indikator |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Identifikasi Isu | <ul style="list-style-type: none"> • Survei data dasar • Identifikasi Kelompok Inti, Kelompok Fokus, dan stakeholders • Pertemuan informal/formal untuk menggali info dan isu • Pelatihan Kelompok Inti untuk identifikasi dan analisis isu • Penyusunan draft profil • Sosialisasi, konsultasi isu-isu kepada masyarakat, Pemerintah Desa, KTF, dan secara teknis kepada Proyek Pesisir • Perbaikan dokumen profil • Diseminasi profil • Pelaksanaan awal dilaksanakan • PLH dan pelatihan masyarakat serta studi banding | <ul style="list-style-type: none"> • Data dasar mengenai desa (Sejarah, lingkungan, social-ekonomi) • Terbentuknya Kelompok Inti • Diperoleh consensus tentang isu dan tingkat kesadaran masyarakat • Diperoleh info mengenai stakeholders di desa dan keaktifan Kelompok Inti • Isu-isu dapat diidentifikasi • Masyarakat dan Kelompok Inti memahami program • Kapasitas masyarakat untuk pengelolaan ditingkatkan • Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap • Penanganan awal isu-isu • lingkungan hidup meningkat | <ul style="list-style-type: none"> • Ada laporan data dasar • Kelompok Inti terbentuk • Dokumen profil diselesaikan dan disepakati • Jumlah pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan, jumlah rapat, studi banding, pertemuan tingkat desa dan KTF • Jumlah peserta • Jumlah pelaksanaan awal yang dilaksanakan dan jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan awal • Laporan pelaksanaan awal dan pertanggungjawaban keuangan • Frekwensi pemanfaatan secara destruktif menjadi berkurang • Meningkatnya pengawasan dan penindakan kegiatan merusak |
| Persiapan dan Perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya dana pelatihan pengelolaan pesisir terpadu (ICM) • Pelatihan Kelompok Inti untuk penyusunan rencana • Penyusunan draft Rencana Pengelolaan • Sosialisasi, konsultasi isu-isu prioritas kepada masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait • Perbaikan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengelolaan • Diseminasi Rencana Pembangunan dan Pengelolaan • Pelaksanaan awal dilanjutkan | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya visi, strategi, tujuan, dan kegiatan, serta kelembagaan dalam pengelolaan • Adanya konsensus Rencana Pengelolaan • Diketahui dan ditetapkannya isu-isu prioritas oleh masyarakat, pemerintah, dan instansi-instansi terkait • Masukan, koreksi, dan tambahan dari pihak-pihak terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya draft Rencana Pengelolaan • Jumlah pertemuan dan konsultasi, lokakarya, dan sosialisasi masyarakat desa • Banyaknya input-input dari masyarakat dan instansi terkait mengenai Rencana Pengelolaan |
| Persetujuan Rencana dan Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah desa untuk persetujuan • Pertemuan/lokakarya KTF untuk membahas draft dan persetujuan rencana • Review dari Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan dan sumber dana • Penandatanganan dan peresmian Rencana Pengelolaan | <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan akhir yang bersifat formal dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan • Persetujuan tujuan, strategi, kegiatan, kelembagaan, dan sumber dana • Dukungan penuh dari pemerintah/instansi terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah umum persetujuan rencana pengelolaan dan pembangunan • Ditandatanganinya rencana pengelolaan melalui SK Desa oleh pemerintah setempat • Kegiatan pelaksanaan rencana pengelolaan akan teranggarkan dalam RAPBD/RAPBN |

| Langkah | Kegiatan | Hasil yang diharapkan | Indikator |
|-------------------------|---|--|---|
| Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Rencana Tahunan • Bantuan dana (<i>grant</i>) pelaksanaan • Pengusulan kegiatan tahunan lewat Musbang/Rakorbang | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tahunan disepakati • Kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat • Kegiatan didanai | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Tahunan • Pelaksanaan efektif • Jumlah dana yang dianggarkan disepakati |
| Pemantauan dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi kegiatan • Evaluasi pelanggaran peraturan • Pemantauan dan evaluasi sumberdaya pesisir • Pemantauan dan evaluasi pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dipantau dan dievaluasi • Peraturan ditegakkan dan ditaati • Sumberdaya pesisir semakin baik • Dana dimanfaatkan dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan yang dilaksanakan • Jumlah pelanggaran aturan dan sanksi yang ditetapkan • Jumlah tangkapan ikan, biofisik lingkungan • Jumlah dana yang dimanfaatkan dan tersisa |



BAPPENAS

